



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Saudara-saudara warga masyarakat Kabupaten Purworejo yang kami hormati.

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT - Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) yang menyebutkan bahwa selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disampaikan dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah pada Tahun Anggaran 2019. Selanjutnya melalui media ini kami sampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021, Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purworejo periode Tahun 2016-2021, yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN PURWOREJO YANG SEMAKIN SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN, PARIWISATA, INDUSTRI, DAN PERDAGANGAN YANG BERWAWASAN BUDAYA, LINGKUNGAN, DAN EKONOMI KERAKYATAN“

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, misinya adalah:

1. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang religius dan demokratis.
2. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan.
3. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai daerah tujuan wisata unggulan berbasis budaya dan kearifan lokal.

4. Mewujudkan Kabupaten Purworejo yang unggul di bidang seni, budaya, dan olahraga.
5. Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan.
6. Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik.
7. Mewujudkan desa di Kabupaten Purworejo sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang.

Pembangunan manusia di Kabupaten Purworejo memperlihatkan peningkatan selama kurun waktu 2016-2018. Hal ini ditunjukkan oleh capaian angka IPM selama kurun waktu tersebut, yaitu mencapai 70,66 pada tahun 2016, meningkat menjadi 71,31 pada tahun 2017 dan kembali meningkat menjadi 71,87 pada tahun 2018. Capaian IPM tersebut membawa status pembangunan manusia di kabupaten Purworejo menjadi “tinggi”. Perubahan status ini mulai tercapai sejak tahun 2014. Capaian IPM Kabupaten Purworejo tahun 2018 merupakan yang tertinggi setelah Kota Magelang se-Eks Karesidenan Kedu. Selain itu capaian pembangunan manusia Kabupaten Purworejo tahun 2018 menduduki peringkat 14 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

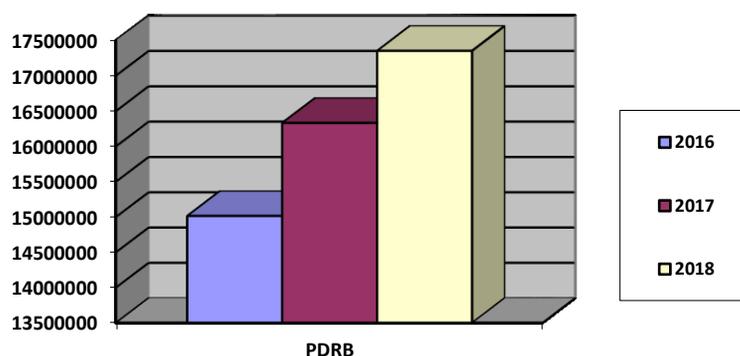
Tabel 1.1
Perkembangan IPM Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2016-2018

TAHUN	PURWOREJO	JAWA TENGAH
2016	70,66	69,98
2017	71,31	70,52
2018	71,87	71,12

(Sumber data : IPM Kabupaten Purworejo, BPS, 2018)

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.1
Pertumbuhan PDRB menurut harga berlaku Kabupaten Purworejo

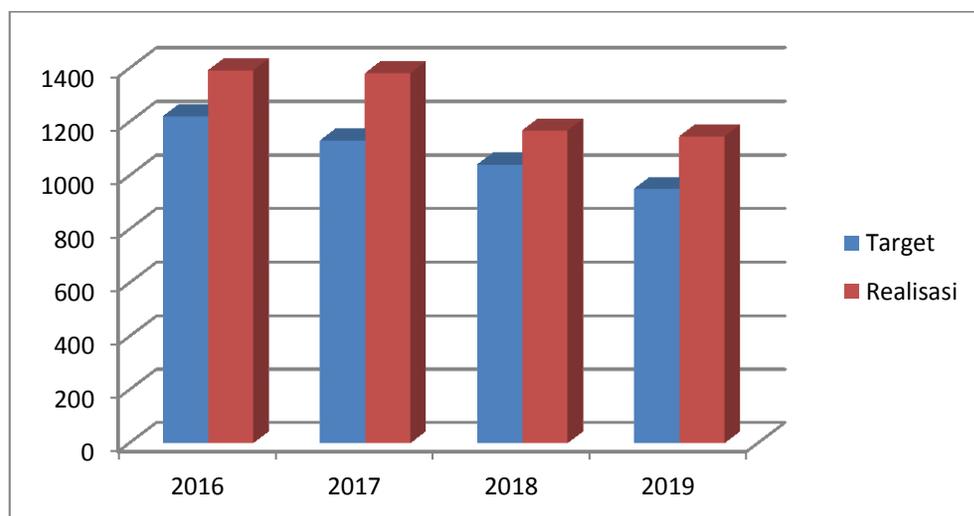


Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha 2014-2018 (diolah)

Perekonomian Purworejo cenderung meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2017 yang ditandai dengan naiknya pertumbuhan ekonomi dari 5,15% menjadi 5,31% sedangkan Jawa Tengah pertumbuhan ekonominya *menurun* dari angka 5,52% pada tahun 2016 menjadi 5,26% pada tahun 2017. Kondisi di tahun 2017 tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purworejo berada di atas pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Tengah.

Dalam kurun waktu 2016-2019, presentase penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 2,46 persen. Kalau pada tahun 2016 presentase penduduk miskin 13,91 persen, maka pada tahun 2019 turun menjadi 11,45 persen.

Gambar 1.2
Presentase Penduduk Miskin
Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2019



(Sumber data : BAPPEDA Kabupaten Purworejo, 2019)

II. PENJABARAN APBD

Kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Purworejo pada tahun anggaran 2019 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain mengacu Peraturan Daerah, penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Hasil akhir dari proses pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban atas APBD Tahun Anggaran 2019 beserta perubahannya disajikan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019, yang disusun setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selesai diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Secara keseluruhan pendapatan daerah dapat tercapai sebesar 99,445% atau Rp 2.172.437.151.704,65 (*Dua triliun seratus tujuh puluh dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh satu ribu tujuh*

ratus empat koma enam puluh lima rupiah) dari target yang dianggarkan sebesar Rp 2.184.630.838.836,00 (Dua triliun seratus delapan puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Tabel. 2.1.
Anggarandan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN	2,184,630,838,836.00	2,172,436,857,095.65	99.44
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	294,463,075,397.00	280,396,087,581.65	95.22
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	70,464,232,920.00	77,648,792,775.00	110.20
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	15,847,645,850.00	14,850,251,887.00	93.71
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13,572,846,917.00	13,686,362,533.00	100.84
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	194,578,349,710.00	174,210,680,386.65	89.53
1.2	DANA PERIMBANGAN	1,306,152,607,863.00	1,292,431,347,427.00	98.95
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26,508,139,000.00	19,577,301,012.00	73.85
1.2.2	Dana Alokasi Umum	960,347,165,000.00	963,312,191,000.00	100.31
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	319,297,303,863.00	309,541,855,415.00	96.94
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	584,015,155,576.00	599,609,422,087.00	102.67
1.3.1	Pendapatan Hibah	69,594,791,576.00	81,401,202,073.00	116.96
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	101,242,356,000.00	98,498,930,096.00	97.29
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	35,465,110,000.00	35,465,110,000.00	100.00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	10,795,000,000.00	17,326,281,918.00	160.50
1.3.6	Alokasi Dana Desa	366,917,898,000.00	366,917,898,000.00	100.00

Sumber: BPPKAD (Analisis, 2020).

Sedangkan belanja daerah dapat tercapai sebesar 95,67% atau Rp 2.186.304.776.061,82 (Dua triliun seratus delapan puluh enam milyar tiga ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam puluh satu koma delapan puluh dua rupiah) dari target yang dianggarkan sebesar Rp 2.285.142.472.474,00 (Dua trilyun dua ratus delapan puluh lima milyar seratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
2	BELANJA	2,285,142,472,474.00	2,186,304,776,061.82	95.67
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,410,009,580,607.00	1,369,391,713,809.00	97.12
2.1.1	Belanja Pegawai	853,589,347,812.00	819,962,960,299.00	96.06
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	35,785,567,900.00	33,508,537,680.00	93.64
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	12,424,650,000.00	11,185,050,000.00	90.02
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8,168,424,000.00	8,136,060,932.00	99.60
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	498,441,018,500.00	496,599,104,898.00	99.63
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,600,572,395.00	0.00	-
2.2	BELANJA LANGSUNG	875,132,891,867.00	816,913,062,252.82	93.35
2.2.1	Belanja Pegawai	83,552,577,864.00	71,660,407,540.00	85.77
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	453,997,871,213.00	417,812,739,299.32	92.03
2.2.3	Belanja Modal	337,582,442,790.00	327,439,915,413.50	97.00

Sumber : BPPKAD (Analisis, 2020).

Berdasarkan perhitungan realisasi anggaran sebagaimana diatas. maka dalam Tahun Anggaran 2019 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan sebesar Rp 87.824.659.973,83 (*Delapan puluh tujuh milyar delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh tiga rupiah*).

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2019

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
3	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	109,111,633,638.00	110,292,578,940.00	101.08
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	107,111,633,638.00	107,111,633,638.00	100.00
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	2,000,000,000.00	3,180,945,302.00	159.05
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8,600,000,000.00	8,600,000,000.00	100.00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8,600,000,000.00	8,600,000,000.00	100.00
	PEMBIAYAAN NETTO	100,511,633,638.00	101,692,578,940.00	101.17
	SISA LEBIH/KURANG TAHUN BERKENAAN	0.00	87,824,659,973.83	0.00

Sumber : BPPKAD (Analisis, 2020).

Angka tersebut merupakan angka perhitungan SEMENTARA, karena perhitungan yang bersifat FINAL akan dilakukan lebih lanjut pada

penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2019 setelah dilakukan audit oleh BPK RI.

III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pemerintah Kabupaten Purworejo melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang merupakan tahun keempat pelaksanaan pembangunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Guna mewujudkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tersebut, Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dikelompokkan sesuai masing-masing urusan.

Pada tahun 2019 kegiatan yang dilaksanakan meliputi kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan Fungsi Penunjang Pemerintahan.

Program dan kegiatan yang menonjol antara lain: pengadaan sarana prasarana pendidikan, peningkatan sarana prasarana kesehatan, pengadaan sarana prasarana pertanian dalam arti luas, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, penanggulangan bencana daerah, serta pengembangan pariwisata.

A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan

Penanganan urusan wajib pendidikan telah memberikan beberapa hal positif, antara lain dalam hal aksesibilitas pendidikan dan terwujudnya satuan pendidikan berbasis e-learning.

PERKEMBANGAN KINERJA SASARAN URUSAN PENDIDIKAN
BERDASARKAN VISI MISI PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
(RPJMD TAHUN 2016-2021)

No	Sasaran	Indikator	Realisasi	Target	Realisasi	capaian kinerja	Target akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019			
<i>Misi 5 : Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten yang unggul dibidang Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan</i>							
1.	Meningkatnya Aksesibilitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah	7,66	7,0	7,66	100%	7,2
		Angka harapan lama sekolah	13,05	13,90	13,05	93,88%	14,3
2.	Terwujudnya Satuan pendidikan berbasis e-learning	Cakupan wilayah penerapan e-learning di tingkat	100%	100%	100%	100%	100%

		SD					
		Cakupan wilayah penerapan e-learning di tingkat SMP	100%	100%	100%	100%	100%

Hasil kegiatan dalam peningkatan kualitas pendidikan antara lain:

- a. Tersalurkannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat untuk 508 SD dan 43 SMP, serta sekolah inklusi di 10 SDN dan 2 SMPN;
- b. Tersedianya dana pengembangan sekolah untuk 507 SD, 43 SMP, 2 SMPT, 3 sekolah berprestasi, 709 PTT SMP dan 1.788 GTT;
- c. Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas SD dengan tingkat kerusakan sedang atau berat, beserta perabotnya (DAK) sebanyak 121 ruang;
- d. Terlaksananya rehabilitasi toilet (jamban) siswa SD dengan tingkat kerusakan sedang/berat, beserta sanitasinya 19 ruang (DAK)
- e. Terlaksananya pembangunan 2 ruang kelas baru beserta perabotnya;
- f. Terlaksananya pengadaan 6 paket peralatan laboratorium komputer;
- g. Terlaksananya rehabilitasi 21 ruang kelas SD/SMP yang rusak;
- h. Terlaksananya pengadaan buku koleksi perpustakaan di 41 SD;
- i. Terlaksananya rehabilitasi jamban dan sanitasi di 20 SD dan 20 SMP;
- j. Terselenggaranya pengembangan Sekolah Rujukan di 8 SD dan 5 SMP;
- k. Terselenggaranya pengelolaan beasiswa siswa keluarga kurang mampu untuk 29.000 siswa;
- l. Terselenggaranya ujian sekolah untuk 11.437 siswa SD;
- m. Terselenggaranya UN dan UNPK 101 SMP dan 25 Paket.

2. Kesehatan

Penanganan urusan kesehatan dilakukan dengan mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

PERKEMBANGAN KINERJA SASARAN URUSAN KESEHATAN
BERDASARKAN VISI MISI PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
(RPJMD TAHUN 2016-2021)

No	Sasaran	Indikator	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		% capaian kinerja	Target akhir periode RPJMD	
				Target	Realisasi			
Misi II :Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan								
1.	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	Persentase cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu	100%	100%	100%	100%	100%	
Misi V : Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai Kabupaten yang unggul di bidang pendidikan dan pelayanan kesehatan								
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	74,26	74,31	<i>belum release</i>	-	74,50	
		Angka Kematian Ibu	78,8/100.000 KH	71/100.000 KH	179,9/100.000KH	253%	70/100.000 KH	
		Angka Kematian Balita	10,35/1.000 KH	11/1.000 KH	13,82/1.000KH	125,6%	10/1.000 KH	
		Angka Kematian Bayi	9,34/1.000 KH	11/1.000 KH	10,79/1.000KH	98%	11/1.000 KH	
		Prevalensi Gizi Buruk	0,03%	0,06%	0,03%	100%	0,05%	
		Eliminasi Malaria						
		API	0,27	<1	0	100%	<1	
		Kasus Indogenius	96,6%	35%	0	100%	0%	

Hasil Kegiatan Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2019 :

- a. Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana, alat kesehatan, operasional dan pelayanan di 27 puskesmas;
- b. Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi, penyediaan sarana prasarana, alat kesehatan, operasional dan pelayanan di 27 puskesmas. RSUD dr Tjitrowardojo;
- c. Tersedianya Obat, Bahan Medis Habis Pakai dan Perbekalan Kesehatan
- d. Terlaksananya Upaya Kesehatan Masyarakat;
- e. Terlaksananya Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) terbayarnya klaim Non Kuota sebanyak 2500 pasien;
- f. Terbayarnya Iuran Premi BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin sejumlah 31.600 orang;
- g. Terlaksananya Promosi Kesehatan, Pendataan PHBS dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
- h. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi, Balita, Anak Sekolah, Usia Produktif dan Lansia;
- i. Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular (DBD, TBC, HIV, Malaria, ISPA dan lainnya) dan Penyakit Tidak Menular (Diabetes Militus, Hipertensi, dan lainnya);
- j. Terlaksananya Pelayanan Penyehatan Lingkungan;
- k. Tersedianya Intlasi Pengolahan Air Limbah sejumlah 7 unit.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PERKEMBANGAN KINERJA SASARAN
URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
BERDASARKAN VISI MISI PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO (RPJMD
TAHUN 2016-2021)

No	Sasaran	Indikator	Realisasi	Target	Realisasi	% capaian kinerja	Target akhir periode RPJMD
			Tahun 2018	Tahun 2019			
Misi 2: Mewujudkan Kabupaten Purworejo sebagai gerbang ekonomi utama bagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbasis pertanian, pariwisata, industri, dan perdagangan							
1.	Terwujudnya Interkoneksi Antar Pusat Kegiatan dan Produksi di Kabupaten	Persentase Interkoneksi Antar Pusat Kegiatan dan Produksi di Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Kesesuaian Arah Penggunaan Lahan	Persentase Peningkatan Kesesuaian Arah Penggunaan Lahan	86,93%	90%	86,93%	96,59%	90%
3.	Meningkatnya Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan Border City	Persentase Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh, Perkotaan Purworejo-Kutoarjo dan Border City	53,01%	50,80 %	50,65%	99,71%	55%
4.	Meningkatnya Pelayanan Irigasi	Persentase Kinerja Layanan Irigasi	60,47%	70,28 %	62,02%	88,24%	72,71%
Misi 6 : Mewujudkan Kabupaten Purworejo menjadi kabupaten yang memiliki aparatur pemerintahan yang mampu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan partisipatif yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik							
5.	Meningkatnya dukungan kinerja perangkat daerah	Cakupan Dukungan Terhadap Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Di Kabupaten Purworejo terdapat jalan kabupaten sepanjang 769,25 km. Dari seluruh jalan kabupaten tersebut, pada tahun 2020 yang dalam kondisi baik - sedang 607,28 km (78,94%), rusak 86,74 km (11,28%) dan rusak berat 75,23 km (9,78%). Ditengah keterbatasan anggaran dan tingginya curah hujan yang mengakibatkan kerusakan jalan, berbagai upaya pemeliharaan dan peningkatan jalan telah dilakukan. Antara lain terlaksananya peningkatan Jalan Kalihaarjo - Somongari, Jalan Purwodadi - Bubutan, Jalan Sendangsari -

Temenggungan, Jalan Kemiri- Pituruh, Jalan Pangenrejo - Tegalrejo, Jalan Bedug – Manisjagan, Jalan Banyuasin – CacabanLor, Jalan Banyuasin - Tridadi, Jalan Tridadi - Pucungroto, Jalan Ketawang - Laban, Jalan Candisari - Sawit, Jalan Tunjungtejo – Blekatuk, Jalan Tridaadi - Somowono, Jalan Purwodadi – Ngombol, Jalan Semagung - Durensari, Jalan Brigjend Katamso, Jalan Durensari – Batas DIY, serta beberapa kegiatan penggantian jembatan kabupaten yaitu Jembatan Trirenggo, Jembatan Triwarno, Jembatan Rejowinangun, Jembatan Sejiwan, serta kegiatan pembangunan jalan poros desa.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Hasil kegiatan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara lain terlaksananya pendampingan BPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) sebanyak 2000 rumah, fasilitasi RTLH (Rumah Tangga Layak Huni) 1000 unit, 3 paket pembangunan jalan kelurahan, pendampingan PAMSIMAS di 23 desa, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan di 7 desa, serta fasilitasi Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) di 10 desa. Prestasi yang diperoleh Kabupaten Purworejo pada Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman Rakyat adalah dinobatkan sebagai Tim Pelaksana Terbaik dari Kementerian PUPR.

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Hasil kegiatan antara lain terlaksananya penegakan 23 Produk Hukum Daerah; pelayanan pemadam kebakaran; 11 kali kegiatan operasi disiplin PNS; operasi PGOT, PSK, pelajar dan remaja jalanan; penegakan produk hukum secara yustisi, antisipasi penanganan pelanggaran; 16 kali patroli wilayah; operasi kerjasama di perbatasan; pelatihan Kader Siaga Trantib; tersedianya 2 alat deteksi dini bencana; penanganan tanggap darurat bencana; pengelolaan logistik tanggap darurat bencana alam; pengadaan tanah relokasi bencana; serta pembentukan 15 desa tangguh bencana

6. Urusan Sosial

Hasil kegiatan di bidang sosial antara lain berupa terlaksananya fasilitasi dan penanganan penyandang disabilitas; alat bantu disabilitas dan modal usaha stimulan (bansos), fasilitasi jaminan hidup bagi difabel berat, fasilitasi KUBE disabilitas, bimbingan lanjut keterampilan, fasilitasi bansos bagi disabilitas tunarunguwicara, premi BPJS kesehatan; penanganan lanjut usia; terfasilitasinya Program Keluarga Harapan, pelayanan penanganan masalah sosial dikecamatan dan fasilitasi layanan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, serta validasi sasaran program penanganan fakir miskin.

B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. Urusan Tenaga Kerja

Hasil kegiatan dalam penanganan urusan ketenagakerjaan antara lain tersedianya 545 peralatan pendidikan dan pelatihan; pelatihan ketrampilan kejuruan prosesing, garmen, otomotif, bisnis manajemen, las, listrik, batik; pelatihan berbasis kompetensi untuk 16 orang; informasi pasar kerja sosialisasi penempatan tenaga kerja

untuk 100 orang; pelatihan tenaga kerja melalui terapan teknologi tepat guna (TTG) untuk 40 orang.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hasil kegiatan meliputi terlaksananya Pengarusutamaan Gender(PUG); perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak; Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A); penyelenggaraan pemenuhan hak anak fasilitasi pembinaan DWP dan GOW; dukungan peningkatan kualitas hidup.

3. Urusan Pangan

Hasil kegiatan antara lain berupaterlaksananya Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) di 9 desa; Gerakan Mandiri Pangan berupa Bantuan 300 ekor ternak unggas Sosialisasi Pelatihan; Pembangunan Lumbung Pangan; fasilitasi Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.

4. Urusan Pertanahan

Hasil kegiatan antara lain terlaksananya identifikasi tanah negara, fasilitasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk fasilitas umum, serta penanganan sengketa pertanahan.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Hasil kegiatan dalam penanganan urusan lingkungan hidup antara lain terlaksananya pengelolaan TPA, penanganan kebersihan dan pertamanan, pengadaan alat-alat laboratorium, pengelolaan kawasan lindung di luar kawasan hutan Desa Kaliglagah dan Tepansari, terlaksananya pemeliharaan pertamanan dan sarana kebersihan, pengecatan tugu, patung dan monumen, belanja tanaman taman, penggantian media tanam pada pot, pemeliharaan taman kota, penanganan pohon ayoman berbahaya, pemeliharaan lampu taman, pengadaan pohon ayoman dan elemen taman, penghijauan di wilayah rawan longsor, sumber mata air, dan daerah konservasi.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hasil kegiatan diantaranya terlaksananya pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu; pelayanan 63.208 KTP el, 76.549 KK, 45.120 KIA, 21.482 surat keterangan pindah/datang; pengadaan peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el; serta pemutahiran data kependudukan sebanyak 50.000 KK.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penanganan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui beberapa program dan kegiatan, antara lain terfasilitasinya program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD di Desa Durensari, Desa Sukowuwuh, Desa Wirun; fasilitasi gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di 32 desa/kelurahan binaan; penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) berbasis pemberdayaan masyarakat di 16 kecamatan; posyantek di 32 desa, kegiatan Bupati Saba Desa; fasilitasi 343 pemilihan kepala desa; cetak 20.000 kalender kabupaten membangun desa; pendampingan dan pelatihan pengelolaan Dana Desa dan ADD di 469 desa.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mendukung keberhasilan program KB, telah dilaksanakan pelayanan kontrasepsi KB untuk 1000 orang, fasilitasi penggerakan KB melalui Organisasi Masyarakat Pelayanan Komunikasi Informasi Edukasi KKB (KIEKKB); pengadaan genre kit; biaya operasional keluarga berencana untuk 16 balai, 55 faskes, 40 kampung KB, 494 desa; pelayanan kontrasepsi keluarga berencana bagi keluarga miskin sebanyak 557 akseptor; pelatihan kader kelompok tri bina keluarga dan anggota posdaya sebanyak 48 kelompok 192 orang.

9. Urusan Perhubungan

Hasil kegiatan antara lain tersedianya rambu lalu lintas berupa 118 buah rambu jalan dan 10 buah RPPJ, traffic light dan counter down, pembayaran rekening lampu PJU, penambahan lampu penerangan jalan 79 titik, pengecatan marka jalan dan zebra cross 8.700 meter, pemeliharaan 23 Traffic light dan 62 warning light, pemeliharaan LPJU 4000 titik; pengelolaan perpajakan; pelayanan uji kelayakan sarana transportasi darat 9000 KBWU; pemeliharaan perlintasan sebidang di 5 lokasi. Prestasi yang diperoleh Kabupaten Purworejo pada Bidang Urusan Perhubungan adalah Sertifikat Wahana Tata Nugraha dari Menteri Perhubungan. Selain itu juga penghargaan atas keberhasilan mengikuti penilaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2019.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Hasil kegiatan antara lain terlaksananya sistem data elektronik berupa langganan dan pemeliharaan jaringan internet dan intranet (client dan server) hosting dan pemeliharaan website 42 perangkat daerah, tersedianya sarana prasarana pendukung smartcity (pengadaan server dan sarana prasarana pendukung) 5 jenis dan fasilitasi PPID di 42 perangkat daerah.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain terlaksananya pengembangan OVOP (*one village one product*) 32 UMK dan 48 produk; fasilitasi inkubasi bisnis 32 UMK; temu usaha permodalan dan pemasaran 300 UMK; pembangunan shelter PKL Kutoarjo; fasilitasi perijinan PIRT UMK 120 UKM pangan olahan; pelatihan perkoperasian 120 koperasi; penilaian kesehatan terhadap 150 KSP/USP/KJKS/UJKS. Jumlah koperasi se Kabupaten Purworejo adalah 268. Selama 2019 direncanakan melakukan penilaian terhadap 150 koperasi. Akan tetapi hanya dapat menilai 123 koperasi dengan hasil jumlah koperasi sehat 120 koperasi dan 3 koperasi dalam pengawasan. 27 koperasi belum melaksanakan RAT sehingga tidak dapat dinilai

12. Urusan Penanaman Modal

Hasil kegiatan antara lain berupa terlaksananya pelayanan perijinan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIM perizinan; promosi dan kerjasama investasi; monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan. Prestasi yang diperoleh Kabupaten Purworejo adalah sebagai juara II stand terbaik Indonesia Product Expo 2019.

13. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Perhatian terhadap generasi muda antara lain dilakukan dengan dilaksanakannya kegiatan pembentukan sikap mental dan kedisiplinan siswa; kompetisi Olahraga Pelajar (POPDA); kejuaraan dan invistasi olahraga, pembinaan Organisasi Kepemudaan (KNPI). Juga tersedianya sarana prasarana olahraga seperti GOR/Stadion WR. Soepratman dan Gedung Pemuda Butuh.

14. Urusan Statistik

Hasil kegiatan pada urusan statistik antara lain berupa tersusunnya dokumen statistik sektoral, statistik ekonomi dan statistik sosial; terselenggaranya Pusat Layanan Statistik dan Data Kabupaten Purworejo, serta supervisi dan koordinasi penyusunan statistik sektoral kabupaten di 42 perangkat daerah dan 494 desa/kelurahan.

15. Urusan Persandian

Hasil kegiatan berupa terlaksananya pengelolaan jasa persandian.

16. Urusan Kebudayaan

Sebagai daerah yang memiliki beragam seni budaya, telah dilakukan upaya penanganan urusan kebudayaan, antara lain terselenggaranya pementasan seni dalam dan luar daerah 38 kali, parade budaya 2 event, fasilitasi grup kesenian 60 paket, pelestarian fisik cagar budaya, pengelolaan museum dan pelestarian nilai tradisi, bantuan operasional penyelenggaraan museum, festival seni dolalak 17 kali, pemeliharaan dan pengelolaan gedung kesenian

Prestasi yang diperoleh Kabupaten Purworejo pada Bidang Urusan Kebudayaan adalah sebagai berikut (bila ada) :

1. Penyaji Terbaik I pada Apresiasi Atraksi Wisata Seni Budaya Eks. Karesidenan Kedu
2. Penyaji Harapan 1 pada Apresiasi Atraksi Wisata Seni Budaya Event Bersama Jawa Tengah Tahun 2019
3. Piagam Penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia-Dunia atas Penyelenggaraan Rekor Festival Tari Dolalak dengan peserta terbanyak, 5.600 penari

17. Urusan Perpustakaan

Hasil kegiatan antara lain terlaksananya penyelenggaraan perpustakaan umum menetap/keliling di 44 lokasi, penyediaan 9750 bahan pustaka/ buku perpustakaan, lomba perpustakaan, pengembangan Perpuseru di 17 Desa, bimtek perpustakaan untuk 50 orang petugas pengelola perpustades, serta pemeliharaan sarpras layanan perpustakaan

18. Urusan Kearsipan

Penanganan urusan kearsipan telah dilakukan melalui berbagai upaya dengan hasil antara lain tersedianya sarpras kearsipan, monitoring dan evaluasi kearsipan di 109 obyek, pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah, serta pembenahan arsip di 2 Bagian Setda dan 4 SMPN.

C. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

Dalam upaya meningkatkan produksi ikan, telah dilakukan berbagai kegiatan dengan hasil antara lain terlaksananya pengembangan budidaya perikanan air tawar di 11 kelompok; percontohan budidaya air tawar berupa pengadaan benih ikan, pakan ikan, probiotik, terpal dan peralatan budidaya untuk 16 kelompok; pengadaan sarana penangkapan ikan berupa perahu, mesin perahu, jaring, life jacket (rompi pelampung); serta kajian appraisal pengadaan tanah balai benih ikan.

2. Urusan Pariwisata

Untuk mempromosikan obyek wisata Kabupaten Purworejo, telah dilaksanakan pengembangan pengembangan fasilitas penunjang wisata seperti ringging stage, command center, CCTV, tenda, lampu asmaul husna, jaringan instalasi listrik, peralatan bengkel, sarana bermain anak, ornamen alun-alun, jaringan drain fountain. Selain itu juga pembangunan art center, dome theater, pengelolaan obyek wisata dan aset daerah; pembuatan sarana promosi wisata; pelatihan manajemen kelompok sadar wisata dan jambore pokdarwis; pembangunan kawasan wisata terpadu Jatimalang; revitalisasi Gedung Wanita A Yani; Festival Desa Wisata Kaligono, Ketawangrejo, Jati; pengembangan wisata terpadu; pengadaan lanscape di daya tarik wisata Pantai Jatimalang; tempat parkir wisata Goa Seplawan; vegetasi tanaman Waru Laut. Prestasi yang diraih antara lain juara stan terbaik Gelar Desa Wisata Tahun 2019, juara II Apresiasi Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata Jawa Tengah 2019

3. Urusan Pertanian

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menunjang pembangunan pertanian antara lain terlaksananya pembangunan jalan usaha tani, pelatihan budidaya tanaman hortikultura 910 RTM, pengembangan tanaman pangan, fasilitasi pertanian padi organik, pembinaan penyuluhan ke pelaku utama/usaha 494 wilayah binaan, pembangunan Balai Penyuluhan Pertanian Grabag, pengembangan dan pemberdayaan petani/kelompok tani (IPDMIP-IFAD), pengadaan bibit ternak kambing dan sapi, pembangunan puskesmas Kaligesing, sekolah lapang pengendalian hama tanaman terpadu, pengelolaan tanaman terpadu, serta penanaman tanaman hortikultura unggulan

4. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa fasilitasi sektor sumber daya mineral.

5. Urusan Perdagangan

Dalam rangka penyediaan sarana perdagangan yang baik, pengelolaan pasar daerah tetap diupayakan menjadi tempat usaha yang memadai dengan hasil berupa terlaksananya revitalisasi pasar rakyat, pembangunan pasar beras Kutoarjo, dan operasional pasar daerah. Selain itu, juga dilakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, BBM dan BBG, pelayanan UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya), penyediaan sarana dalam mendukung

pembentukan unit metrologi legal, dan 8 kali pameran produk unggulan daerah.

6. Urusan Perindustrian

Hasil kegiatan antara lain berupa terlaksananya Pengembangan Industri Komoditas Agro untuk 6 KUB di Kecamatan Grabag; pelatihan produk batik khas purworejo, pembuatan gula kelapa organik, kerajinan bambu, industri kecil logam, dan industri kecil makanan; fasilitasi kegiatan dekranasda.

7. Urusan Transmigrasi

Hasil kegiatan adalah Fasilitasi Transmigrasi.

D. URUSAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN

Hasil kegiatan antara lain terlaksananya:

- a. Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah berupa 20 keputusan dan 10 kajian akademis; 5 kali workshop untuk 45 anggota DPRD, workshop insidentil 75 orang, 2385 perjalanan dinas keluar daerah.
- b. Tersedianya 41 LHP Pra Rev LKD, 1 LHR LkjIP, 1 LHR LKD, 25 LHR Reviu Renja, 2 LHR RKPD, 2 LHR Reviu KUA PPAS, 50 LHR Reviu RKA, 17 LHE SAKIP, 16 LHE SPIP, 1 Laporan Penerapan ZI, 1 Evaluasi Laporan PMPRB, 1 Laporan self assesment Kapabilitas APIP, 1 Laporan self assesment Tingkat Maturitas SPIP, 4 Laporan Korsupgah, 12 Laporan UPG, 1 laporan Telaah Sejawat, 4 laporan Reviu Laporan Pengelolaan Anggaran PBJ dan DD, 1 Laporan Survai Penilaian Integritas, 4 LHP Pengawasan BUMD, 1 LHR Reviu LPPD, 48 LHR Reviu DAK, 1 Laporan Reviu HPS
- c. Terlayaninya kepala daerah dan tamu daerah;
- d. Terlaksananya penyelenggaraan dan pendampingan haji daerah sebanyak 800 orang;
- e. Terkelolanya pajak daerah, PBB dan BPHTB;
- f. Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
- g. Terlaksananya penerbitan produk hukum daerah berupa 24 Perda, 73 Perbup, 743 SK Bupati
- h. Terlaksananya publikasi kegiatan daerah dan kerjasama dengan media massa;
- i. Jasa Layanan Pengadaan barang/jasa 237 paket;
- j. Terlaksananya kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Kecamatan yang dilaksanakan oleh 16 (enam belas) kecamatan;
- k. Terlaksananya kegiatan Penunjang Administrasi Umum yang dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Prestasi yang diperoleh Kabupaten Purworejo pada Fungsi Penunjang urusan Pengawasan adalah sebagai Peringkat IV Nasional dalam Penyelesaian Tindak lanjut Program Pencegahan Korupsi terintegrasi KPK RI (KORSUPGAH KPK) Tahun 2019

IV. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjelaskan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Kegiatan Tugas Pembantuan merupakan kegiatan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota.

Instansi pemberi tugas pembantuan di Kabupaten Purworejo dalam Tahun Anggaran 2019 adalah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembantuan adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo berupa pembangunan/revitalisasi Pasar Rakyat Brunorejo senilai Rp 950.000.000,00.

V. PENUTUP

Pada tahun 2019 lalu, sejumlah prestasi membanggakan berhasil diraih Kabupaten Purworejo. Dalam hal pengelolaan keuangan, Kabupaten Purworejo meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Bahkan karena capaian yang terus menerus itu, Kabupaten Purworejo juga menerima plakat dan piagam WTP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Prestasi itu tentu bukanlah merupakan tujuan akhir, namun diharapkan menambah motivasi untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan dengan semakin disiplin dalam pengelolaan anggaran.

Selain itu, kita juga berhasil meraih berbagai prestasi, antara lain:

1. Penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI;
2. Penghargaan Bakti Koperasi dan UKM dari Kementerian Koperasi dan UKM;
3. Penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA);
4. Penghargaan Terbaik II dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota Pulau Jawa Pendukung Program Kredit Usaha Rakyat (KUR);
5. Penghargaan Tingkat Nasional sebagai Pelaksana Bantuan Sosial Pangan Dengan Kategori Baik di Wilayah II;
6. Sertifikat Wahana Tata Nugraha dari Menteri Perhubungan;
7. Penghargaan atas keberhasilan mengikuti penilaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan;
8. Peringkat IV Nasional dalam Penyelesaian Tindak lanjut Program Pencegahan Korupsi terintegrasi KPK RI (KORSUPGAH KPK);
9. Penghargaan Anugerah Pangripta Abipraja ;

10. Penghargaan Ananta Paramesti sebagai Kabupaten/Kota teraktif 3 dalam publikasi kegiatan pengembangan kompetensi melalui media sosial.

Penghargaan-penghargaan tersebut semakin melengkapi penghargaan prestisius awal tahun 2019 yang pada waktu itu diberikan secara langsung oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla, yakni Piala Adipura.

Selain dari lembaga pemerintah, penghargaan juga diberikan dari lembaga non pemerintah, yaitu Lembaga Prestasi Indonesia Dunia (LEPRID) yang memberikan Piagam Penghargaan atas prestasi sebagai pemrakarsa rekor tari dolalak dengan peserta terbanyak sebanyak 5.600 penari.

Berbagai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun Anggaran 2019 tidak terlepas dari dukungan dan peran serta berbagai pihak. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Kami menyadari disamping capaian keberhasilan sebagaimana tersebut, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2019, masih terdapat program/kegiatan yang hasilnya belum maksimal, hal tersebut menjadi catatan bagi kami untuk senantiasa mengadakan koreksi/perbaikan pada tahun berikutnya.

Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purworejo. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan lahir bathin kepada kita untuk terus bersama-sama membangun Kabupaten Purworejo.

**Sekian dan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Purworejo, Maret 2020



AGUS BASTIAN, S.E., M.M.